

KONDISI INKLUSI, POTENSI DAN KENDALA PENGGUNAAN, TINGKAT PENGARUH LAYANAN DIGITAL, SERTA PENYUSUNAN MODEL LAYANAN DIGITAL TERHADAP PENINGKATAN AKSES KEUANGAN PADA PROVINSI SUMATERA SELATAN (Studi Kasus Pada Provinsi Sumatera Selatan)

Niken Ayuningrum

Dosen Program Studi Akuntansi Politeknik Sekayu

Email : nikenayu.ningrum@yahoo.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the influence of financial education, community property rights, intermediation facilities and financial distribution channels, financial services in the government sector and consumer protection of craftsmen's income of Rattan in District of Gatak, Sukoharjo District. Sampling techniques used a random sampling technique method (Rondom sampling) and obtained 30 research samples. Independent variables (x) include: financial education, community property rights, intermediation facilities and financial distribution channels, financial services in the government sector and consumer protection. Data analysis methods use multiple linear regression analyses. The results of this study show that in the long-term ratio of DPK, interest rates of credit, exchange rate, and the amount of money supply positively affect inflation, while credit ratio has a positive effect on inflation. Variable financial inclusion indicators, interest rate credits, exchange rates, and the amount of money supply have a role in explaining variations in the effectiveness of monetary policy, but in the long term, more than 50percent variation in policy effectiveness explained of Olehinflation. The low role of variable financial inclusion indicators in explaining the effectiveness of monetary policy because financial inclusion in Indonesia is still in development phase. In this study also showed that credit interest rate variables and exchange rates were very responsive to changes in inflation, so it required special attention to keep both variables.

Keywords: *Monetary policy effectiveness, financial inclusion, monetary policy, formal financial services, Informal Financial services, Vector Error Correction Model (VECM)*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh edukasi keuangan, hak properti masyarakat, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan, layanan keuangan pada sektor pemerintah dan perlindungan konsumen terhadap pendapatan pengrajin rotan di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo. Teknik pengambilan sampel menggunakan menggunakan metode teknik sampling acak (rondom sampling) dan diperoleh sampel penelitian 30. Variabel independen (x) meliputi : edukasi keuangan, hak properti masyarakat, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan, layanan keuangan pada sektor pemerintah dan perlindungan konsumen. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang rasio DPK, suku bunga kredit, nilai tukar, dan jumlah uang beredar berpengaruh positif terhadap inflasi, sedangkan rasio kredit berpengaruh positif terhadap inflasi. Variabel indikator inklusi keuangan, suku bunga kredit, nilai tukar, dan jumlah uang beredar memiliki peran dalam menjelaskan variasi efektivitas kebijakan moneter, namun dalam jangka panjang, lebih dari 50persen variasi efektivitas kebijakan dijelaskan olehinflasi. Rendahnya peran variabel indikator inklusi keuangan dalam menjelaskan efektivitas kebijakan moneter karena inklusi keuangan di Indonesia masih dalam tahap pengembangan. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel suku bunga kredit dan nilai tukar sangat responsif terhadap perubahan inflasi, sehingga diperlukan perhatian khusus untuk menjaga kedua variabel tersebut.

Kata Kunci : *Efektivitas kebijakan moneter, inklusi keuangan, kebijakan moneter, layanan keuangan formal, Layanan Keuangan Informal, Vector Error Correction Model (VECM)*

PENDAHULUAN

Faktor penting dalam menunjang kemajuan suatu bangsa diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi. Pertumbuhan ekonomi bukan hanya tugas pemerintah pusat, tetapi juga tugas berbagai pihak seperti pihak swasta, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Akademisi, Otoritas terkait, lembaga keuangan bank dan non-bank, dan seluruh masyarakat pada umumnya. Lembaga keuangan bank berperan sebagai badan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit baik secara konvensional maupun syaria'ah. Bank konvensional dan bank syaria'ah juga mendukung program pemerintah untuk meningkatkan *inklusi* keuangan dengan cara berkerjasama dengan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga lainnya yang terlibat dalam perbaikan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan di Indonesia.

Secara umum layanan digital difungsikan mempermudah nasabah atau calon nasabah dalam mengakses keuangan yang diharapkan dapat memperlancar peredaran uang sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian, namun tingkat inklusinya belum secara maksimal karena secara keseluruhan provinsi di Indonesia baru mencapai 67,8 persen. Permasalahan yang paling umum terjadi dalam penggunaan layanan digital adalah kurangnya informasi yang diperoleh oleh masyarakat, kurangnya fasilitas layanan yang disediakan sejumlah bank, dan kurangnya jaringan digital yang kuat dalam hal yang berkaitan dengan akses keuangan.

Oleh karena itu, kondisi tersebut mengasumsikan bahwa perlu adanya penelitian guna mengetahui kondisi *inklusi*, potensi dan kendala penggunaan layanan digital, tingkat pengaruh layanan digital terhadap peningkatan akses keuangan, serta penyusunan model peningkatan akses keuangan pada Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan uraian latar belakang, makasalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kondisi inklusi, potensi dan kendala penggunaan layanan digital, tingkat pengaruh layanan digital terhadap peningkatan akses keuangan, serta penyusunan model peningkatan akses keuangan pada Provinsi Sumatera Selatan

TELAAH LITERATUR

Pengertian *Financial Inclusion* (Keuangan Inklusif)

Financial inclusion atau keuangan inklusif menjadi istilah yang *familiar* setelah krisis ekonomi pada tahun 2008 yang berdampak pada kelompok yang berpendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, penyanggah kebutuhan khusus, masyarakat pinggiran dan buruh yang tidak mempunyai identitas legal. Kelompok tersebut tergolong sebagai kelompok *in the bottom of the pyramid* yang pada umumnya adalah *unbanked*.

Definisi *financial inclusion* menurut World Bank (2008) yang dikutip oleh Bachtiar (2014) adalah "Sebagai suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk hambatan baik dalam bentuk harga maupun non-harga terhadap akses masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan layanan jasa keuangan."

Efektivitas Komite Visi dan Tujuan *Financial Inclusion* (Keuangan Inklusif)

Visi nasional *Financial Inclusion* (keuangan inklusif) dirumuskan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal melalui peningkatan pemahaman tentang sistem, produk, dan jasa keuangan, serta ketersediaan layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Manfaat *Financial Inclusion* (Keuangan Inklusif)

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral menjelaskan bahwa kondisi inklusif keuangan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efisiensi ekonomi.
- b. Mendukung stabilitas sistem keuangan.
- c. Mengurangi *shadow*.
- d. *Banking* atau *irresponsible finance*.
- e. Mendukung pendalaman pasar keuangan.
- f. Memberikan potensi pasar baru bagi perbankan.
- g. Mendukung peningkatan Human Development Index (HDI) Indonesia

- h. Berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonom lokal dan nasional yang sustain dan berkelanjutan.
- i. Mengurangi kesenjangan (*inequality*) dan *rigiditas low income trap*, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan.

Strategi *Financial Inclusion* (Keuangan Inklusif)

Guna tercapainya visi dan tujuan dari strategi keuangan inklusif, maka diperlukan perencanaan penentuan target atau sasaran yang menjadi objek dari program tersebut. yaitu lebih terfokus kepada kelompok yang mengalami hambatan dalam mengakses layanan keuangan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif mengungkapkan bahwa keuangan inklusif menekankan penyediaan layanan keuangan berdasarkan kebutuhan yang berbeda dari tiap kelompok masyarakat. Meskipun mencakup semua segmen masyarakat, kegiatan keuangan inklusif difokuskan pada kelompok yang belum terpenuhi oleh layanan keuangan formal yaitu masyarakat berpendapatan rendah, pelaku usaha mikro dan kecil, serta masyarakat yang merupakan lintas kelompok.

Target dan Indikator *Financial Inclusion* (Keuangan Inklusif)

Guna memotivasi pihak terkait dalam meningkatkan inklusif keuangan, maka diperlukan penetapan target. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif mengungkapkan bahwa “Target utama keuangan inklusif yaitu persentase jumlah penduduk dewasa yang memiliki akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) di akhir tahun 2019”

Pengertian Layanan *Digital*

Menurut Celent, “*digital banking* adalah tentang bagaimana nasabah memperoleh pengalaman yang konsisten di semua *channel* dan semua interaksi mereka ketika mengakses data industri finansial yang menitikberatkan pada analitik dan otomatisasi proses dan memerlukan perubahan di produk dan jasa, teknologi

informasi dan sumber daya manusia dalam rangka mencapai nilai ekonomis yang optimal.”

Di Indonesia, layanan digital atau digital banking diartikan sebagai layanan atau kegiatan perbankan melalui kantor bank dengan mempergunakan sarana elektronik atau digital milik bank dan melalui media *digital* yang dilakukan secara mandiri oleh nasabah yang memungkinkan calon nasabah atau nasabah bank memperoleh informasi, melakukan komunikasi, registrasi, pembukaan rekening, transaksi perbankan dan penutupan rekening, termasuk memperoleh informasi lain dan transaksi di luar produk perbankan, antara lain *financial advisory* (saran dan pendapat keuangan), investasi, transaksi *e-commerce* dan kebutuhan lainnya.

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sunyoto (2013:22) terdapat 5 (lima) cara yang digunakan dalam mengumpulkan data, yaitu:

1. Metode Wawancara
Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bebas baik terstruktur maupun tidak terstruktur dengan tujuan untuk memperoleh informasi secara luas mengenai objek penelitian.
2. Metode Observasi
Metode observasi adalah suatu metode yang digunakan oleh peneliti dengan cara pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilaksanakan perusahaan.
3. Metode Kuesioner
Metode kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan cara menggunakan daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk dijawab dengan memberikan angket.
4. Metode Survei
Metode survei adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung berhubungan dengan objek penelitian.
5. Metode Eksperimen
Metode eksperimen adalah metode penelitian yang berusaha memanipulasi satu atau lebih variabel

kausal, kemudian mengukur efek manipulasi tersebut terhadap satu atau lebih variabel dependen.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data, yaitu wawancara secara langsung dengan individu atau badan terkait, dokumentasi yaitu pemakaian data dari Biro Pusat Statistik.

Jenis Data

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa data primer, yaitu data yang didapat dari wawancara langsung kepada responden baik individu pribadi maupun badan seperti alasan tidak atau menggunakan layanan digital, alasan tidak atau memiliki tabungan, dan potensi atau kendala yang terjadi dalam penggunaan layanan digital. Data sekunder yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik seperti jumlah individu atau badan usaha yang memiliki tabungan, menggunakan layanan digital, dan data lainnya yang diperlukan selama proses penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Vector Autoregression* (VAR). Hal ini didasarkan pada penelitian Lapukeni (2015) dan Mbutor dan Uba (2013) yang melakukan penelitian single country untuk meneliti dampak inklusi keuangan terhadap kebijakan moneter juga menggunakan metode VAR. Secara spesifik, metode VAR menjelaskan setiap variabel yang terdapat dalam model tergantung pada pergerakan masa lalu variabel itu sendiri dan pergerakan masa lalu dari variabel lain yang terdapat dalam sistem persamaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Variabel yang digunakan di dalam model penelitian ini diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Lapukeni (2015). Dalam penelitian ini variabel-variabel yang dimasukkan di dalam model VAR adalah INFL yang merepresentasikan efektivitas kebijakan moneter, $depst/gdp$ dan $loans/gdp$ yang merepresentasikan indikator inklusi keuangan dari dimensi penggunaan, rate dan nilai tukar yang merepresentasikan saluran transmisi

kebijakan moneter, dan M2 yang digunakan sebagai variabel kontrol berdasarkan teori.

Minimnya penelitian yang membahas dampak inklusi keuangan terhadap efektivitas kebijakan moneter membuat penulis belum bisa menjelaskan lebih lanjut bagaimana inklusi keuangan mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter di Indonesia. Stasioneritas merupakan salah satu prasyarat penting dalam model ekonometrika untuk data runtun waktu (*time series*).

Uji Stasionaritas ini digunakan untuk melihat apakah data yang diamati stasioner atau tidak sebelum melakukan regresi. Gujarati (2003) mengemukakan bahwa data time series dapat dikatakan stasioner jika rata-rata dan variannya konstan sepanjang waktu serta kovarian antara dua runtun waktunya hanya tergantung dari kelambanan (*lag*) antara dua periode waktu tersebut.

Apabila data yang digunakan dalam model ada yang tidak stasioner, maka data tersebut dipertimbangkan kembali validitas dan kestabilannya, karena hasil regresi yang berasal dari data yang tidak stasioner akan menyebabkan *spurious regression*. *Spurious regression* adalah regresi yang memiliki R^2 yang tinggi, namun tidak ada hubungan yang berarti dari keduanya. Salah satu konsep formal yang dipakai untuk mengetahui stasioneritas data adalah melalui uji akar unit (*unit root test*). Uji akar unit pertama kali dikembangkan oleh Dickey-Fuller dan dikenal dengan uji akar unit Dickey-Fuller (DF). Penentuan *lag optimal* dapat diidentifikasi melalui beberapa kriteria, yaitu *Akaike Information Criterion* (AIC), *Schwartz Information Criterion* (SIC), dan *Hannan-Quinn Information Criterion* (HQ).

Stabilitas VAR perlu diuji terlebih dahulu sebelum melakukan analisis lebih jauh, karena jika hasil estimasi VAR yang akan dikombinasikan dengan model koreksi kesalahan tidak stabil, maka *Impulse Response Function* dan *Variance Decomposition* menjadi tidak valid. Engle dan Granger menunjukkan bahwa walaupun data time series sering kali tidak stasioner pada tingkat level atau disebut non stasioneritas data, tetapi kombinasi linier antara dua atau lebih data non stasioner dapat menjadi stasioner (Widarjono, 2013).

Model VECM digunakan di dalam model VAR non struktural apabila data time series tidak stasioner pada tingkat level, tetapi stasioner pada tingkat diferensi dan terko-integrasi

sehingga menunjukkan adanya hubungan teoritis antar variabel.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

- a. Berdasarkan hasil analisis *variance decomposition*, variabel indikator inklusi keuangan berupa $depst/gdp$ dan $loans/gdp$ memiliki kontribusi yang cukup rendah dibandingkan dengan variabel lainnya dan variabel yang memiliki kontribusi yang paling dominan terhadap variasi yang terjadi pada variabel inflasi adalah variabel inflasi (LogINFL) itu sendiri
- b. Berdasarkan hasil analisis *impulse response function*, variabel inflasi sangat responsif terhadap shock yang terjadi pada variabel suku bunga kredit (lr) dan nilai tukar IDR/USD (EXR), karena shock yang terjadi pada variabel tersebut akan direspon negatif oleh inflasi pada awal periode dan respon negatif tersebut terjadi di sepanjang periode penelitian. Selanjutnya variabel inflasi sangat responsif terhadap shock yang terjadi pada variabel pertumbuhan jumlah uang beredar (M2), rasio kredit ($loans/gdp$), dan rasioDPK ($depst/gdp$).

Saran

Adapun saran yang diajukan peneliti untuk perbaikan pada penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut.

- a. Masyarakat *unbanked* (yang tidak mengenal perbankan) di Sumatera Selatan, sehingga pelaksanaan edukasi dan literasi keuangan perlu dilakukan secara intensif, berkesinambungan, mudah (efektif), dan dengan biaya yang murah (efisien).
- b. Pemerintah harus menekankan pembangunan infrastruktur secara

merata, pada wilayah Sumatera Selatan.

- c. Dalam penelitian ini, variabel suku bunga kredit dan nilai tukar paling responsif terhadap perubahan inflasi, sehingga diperlukan perhatian khusus untuk menjaga fluktuasi kedua variabel tersebut agar inflasi yang terjadi diharapkan sesuai dengan target inflasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan Bank
- d. Terdapat berbagai indikator inklusi keuangan yang dapat digunakan sebagai variabel dalam penelitian selanjutnya untuk meneliti lebih lanjut bagaimana dampak inklusi keuangan terhadap kondisi perekonomian di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Widarjono. 2013. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonometrika Dasar. Terjemah Sumarno Zein*. Jakarta: Erlangga.
- Hassan Miraza, Bachtiar. 2014. *Membangun Keuangan Inklusif. Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi I* Vol. 23 No. 2 Desember 2014.
- Mbutor, M. and Uba, I. 2013. *The Impact of Financial Inclusion on Monetary Policy in Nigeria. Journal of Economics and International Finance*, 5, 318-326. (<http://dx.doi.org/10.5897/JEIF2013.0541>, diakses pada tanggal 18 Juli 2019).
- Lapukeni, Angella Faith. 2015. *Financial Inclusion, ICBT and the role of ICT in COMESA. Advance Economic and business* 3(12): 529-537.
- Sunyoto, 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 Tentang *Strategi Nasional Inklusif*.
- Politeknik Sekayu. 2017. *Pedoman Penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa*. Percetakan dan Penerbitan Politeknik Sekayu.